

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Landasan Teori**

##### **2.1.1. Teori yang Berkaitan dengan *Good Corporate Governance* dan Ukuran Perusahaan**

###### **2.1.1.1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)**

Teori keagenan menyangkut hubungan kontraktual antara anggota-anggota di perusahaan. Jensen dan Meckling (1976 : 5) menjelaskan mengenai hubungan agensi adalah sebagai berikut :

*“agency relationship as a contract under which one or more persons (the principal) engage another person (the agent) to perform some service on their behalf which involves delegating some decision making authority to the agent”.*

Prinsipal adalah pemegang saham atau investor, sedangkan agen adalah manajemen yang mengelola perusahaan atau manajer. Inti dari hubungan keagenan adalah adanya pemisahan fungsi antara kepemilikan di investor dan pengelolaan di pihak manajemen.

Pemisahan fungsi seperti ini memiliki segi negatif. Adanya keleluasaan pengelola manajemen perusahaan untuk memaksimalkan laba perusahaan bisa mengarah pada proses memaksimalkan kepentingan pengelolanya sendiri dengan beban biaya yang harus ditanggung oleh pemilik perusahaan (Sutedi, 2011 : 14).

Pemisahan ini dapat pula menimbulkan kurangnya transparansi dalam penggunaan dana pada perusahaan serta keseimbangan yang tepat antara kepentingan-kepentingan yang ada, misalnya antara pemegang saham dengan

pengelola manajemen perusahaan dan antara pemegang saham pengendali dengan pemegang saham minoritas.

Pihak prinsipal sebagai pemilik modal dan pihak yang memberikan mandat terhadap manajer, memberikan kewajiban kepada agen untuk memberikan laporan mengenai kondisi perusahaan. Laporan yang diberikan dapat berupa pengungkapan informasi akuntansi seperti laporan keuangan. Hal tersebut berguna sebagai sarana pengawasan terhadap agen oleh para prinsipal, untuk memastikan modal yang mereka tanamkan berkembang dengan baik. Jika kinerja agen yang ditunjukkan dalam laporan yang diterima oleh prinsipal tidak memuaskan, prinsipal dapat mengambil tindakan sesuai dengan kontrak yang telah dibuat.

Posisi agen sebagai pemegang kunci informasi dan prinsipal sebagai penerima informasi dari agen dapat memicu munculnya suatu kondisi yang disebut sebagai asimetri informasi (*asymetri information*), yaitu suatu kondisi dimana informasi yang diperoleh oleh pihak manajemen sebagai penyedia informasi dengan pihak prinsipal secara umum tidak seimbang.

Menurut Jensen and Meckling (1976) dalam Iqbal (2012 : 3) asimetri informasi terdiri dari dua macam, yaitu *adverse selection* dan *moral hazard*.

1. *Adverse Selection*, yaitu suatu keadaan dimana prinsipal tidak dapat mengetahui apakah suatu keputusan yang diambil oleh agen benar-benar didasarkan atas informasi yang telah diperolehnya atau terjadi sebagai sebuah kelalaian tugas.

2. *Moral Hazard*, yaitu permasalahan yang timbul jika agen tidak melaksanakan hal-hal yang telah disepakati bersama dalam kontrak kerja.

Asimetri antara manajemen dengan pemilik memberikan kesempatan kepada manajer untuk berlaku oportunistik untuk memperoleh keuntungan pribadi. Misalnya dengan tidak menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya untuk mendapatkan bonus pribadi. Manajer dapat melakukan manajemen laba untuk menipu pemilik mengenai kinerja ekonomi perusahaan.

Adanya pemisahan antara pemilik perusahaan dan pengelolaan oleh manajemen cenderung menimbulkan konflik keagenan di antara prinsipal dan agen. Konflik kepentingan antara prinsipal dan agen terjadi karena kemungkinan agen tidak selalu berbuat sesuai dengan keinginan prinsipal, sehingga menimbulkan biaya keagenan (*agency cost*). Menurut Jensen dan Meckling (1976 : 6) *agency cost* itu meliputi tiga hal yaitu *monitoring cost*, *bonding cost*, dan *residual cost*.

*Monitoring cost* adalah biaya yang dikeluarkan oleh prinsipal untuk melakukan pengawasan kepada agen sehingga dapat membatasi aktivitas yang menyimpang dari agen yang disebabkan perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal. *Bonding cost* adalah sumber daya perusahaan yang dibelanjakan agen untuk menjamin agen tidak bertindak yang dapat merugikan prinsipal atau untuk meyakinkan bahwa prinsipal akan memberikan kompensasi jika benar-benar melakukan tindakan tersebut. *Residual cost* adalah nilai uang ekuivalen dengan

pengurangan kesejahteraan yang dialami prinsipal jika terjadi divergensi antara keputusan-keputusan yang dapat memaksimalkan kesejahteraan agen.

Dari pemahaman konteks diatas, terjadinya pemisahan kepemilikan antara agen dan prinsipal akan menimbulkan *agency cost*, karena terdapat perbedaan kepentingan agen dengan prinsipal. Namun adanya perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal menyebabkan munculnya masalah baru. Pendelegasian prinsipal kepada agen membuat pemilik perusahaan tidak dapat mengawasi kinerja manajer, sehingga keputusan manajer kadang tidak sesuai dengan keinginan pemilik perusahaan. Perbedaan kepentingan tersebut dapat mengarah pada tindak kecurangan dan penipuan yang dilakukan agen terhadap prinsipal, yang dikenal dengan istilah *moral hazard*.

#### **2.1.1.2. Teori Pemangku Kepentingan (*Stakeholder Theory*)**

Freeman (1984 : 2) mendefinisikan *Stakeholder* adalah sebagai berikut :

*“Stakeholders as any group or individual who is affected by or can affect the achievement of an organization’s objectives”.*

*Stakeholder* adalah pihak-pihak yang berkepentingan pada perusahaan yang dapat mempengaruhi atau dapat dipengaruhi oleh aktivitas perusahaan, para *stakeholder* antara lain masyarakat, karyawan, pemerintah, supplier, pasar modal dan lain-lain.

Asumsi teori pemangku kepentingan dibangun atas dasar pernyataan bahwa perusahaan berkembang menjadi sangat besar dan menyebabkan masyarakat menjadi sangat terkait dan memerhatikan perusahaan, sehingga

perusahaan perlu menunjukkan akuntabilitas maupun responsibilitas secara lebih luas dan tidak terbatas hanya kepada pemegang saham. Hal ini berarti, perusahaan dan pemangku kepentingan membentuk hubungan yang saling memengaruhi.

Warsono dkk. (2009 : 29-31) mengungkapkan bahwa terdapat tiga argumen yang mendukung pengelolaan perusahaan berdasarkan perspektif teori pemangku kepentingan, yaitu argumen deskriptif, argumen instrumental, dan argumen normatif.

1. Argumen deskriptif menyatakan bahwa pandangan pemangku kepentingan secara sederhana merupakan deskripsi yang realistis mengenai bagaimana perusahaan sebenarnya beroperasi atau bekerja. Manajer harus memberikan perhatian penuh pada kinerja keuangan perusahaan, akan tetapi tugas manajemen lebih penting dari itu. Untuk dapat memperoleh hasil yang konsisten, manajer harus memberikan perhatian pada produksi produk-produk berkualitas tinggi dan inovatif bagi para pelanggan mereka, menarik dan mempertahankan karyawan-karyawan yang berkualitas tinggi, serta mentaati semua regulasi pemerintah yang cukup kompleks. Secara praktis, manajer mengarahkan energi mereka terhadap seluruh pemangku kepentingan, tidak hanya terhadap pemilik saja.
2. Argumen instrumental menyatakan bahwa manajemen terhadap pemangku kepentingan dinilai sebagai suatu strategi perusahaan. Perusahaan-perusahaan yang mempertimbangkan hak dan memberi perhatian pada berbagai kelompok pemangku kepentingannya akan menghasilkan kinerja yang lebih baik.

3. Argumen normatif menyatakan bahwa manajemen terhadap pemangku kepentingan merupakan hal yang benar untuk dilakukan. Perusahaan mempunyai penguasaan dan kendali yang cukup besar terhadap banyak sumber daya, dan hak istimewa ini menyebabkan adanya kewajiban perusahaan terhadap semua pihak yang mendapat efek dari tindakan-tindakan perusahaan.

Pemangku kepentingan dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok berdasarkan atas jenis dan sejauh mana kepentingan kelompok tersebut terhadap perusahaan. Hal ini penting dilakukan untuk membantu analisis perusahaan mengenai tindakan serta perhatian apa yang dibutuhkan oleh masing-masing *stakeholder*. Perubahan yang dapat terjadi pada lingkungan perusahaan kedalam dua kategori, yaitu internal dan eksternal. Bagian dari lingkungan internal adalah pemilik perusahaan, konsumen, karyawan, pemasok, sedangkan yang termasuk bagian dari lingkungan eksternal terdiri atas pemerintah, kompetitor, advokasi konsumen, pemerhati lingkungan, *Special Interest Group* (SIG), dan media (Freeman, 1984 : 10).

Warsono dkk. (2009 : 31-36) mengemukakan bahwa pemangku kepentingan dikategorikan menjadi dua kelompok, yaitu pemangku kepentingan pasar dan pemangku kepentingan non pasar.

#### 1. Pemangku kepentingan pasar

Pemangku kepentingan pasar adalah pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi ekonomik dengan perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tujuan utama perusahaan untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat. Pemangku kepentingan pasar seringkali juga disebut pemangku kepentingan

primer (*primary stakeholder*). Kelompok-kelompok pemangku kepentingan yang ditetapkan sebagai pemangku kepentingan pasar meliputi pemegang saham, kreditur, pemasok, pelanggan, karyawan, dan distributor/pedagang besar/pengecer.

## 2. Pemangku kepentingan non-pasar

Pemangku kepentingan non-pasar adalah orang-orang atau kelompok-kelompok yang walaupun tidak terlibat dalam pertukaran ekonomik langsung dengan perusahaan, dipengaruhi oleh atau dapat memengaruhi tindakan perusahaan. Pemangku kepentingan non-pasar seringkali juga disebut pemangku kepentingan sekunder (*secondary stakeholder*). Kelompok-kelompok pemangku kepentingan yang dikategorikan sebagai pemangku kepentingan non-pasar, meliputi komunitas, berbagai level pemerintahan, kelompok-kelompok aktivis, organisasi non-pemerintah, media, kelompok pendukung bisnis, dan masyarakat umum.

Beberapa individu atau kelompok dapat memainkan multi peran sebagai pemangku kepentingan. Para ahli menyebut fenomena ini sebagai *role sets*. Misalnya, seorang dapat bekerja pada suatu perusahaan, dan sekaligus juga tinggal dalam komunitas di sekitar perusahaan, memiliki saham perusahaan dalam akun pensiunnya, dan bahkan membeli produk yang dihasilkan perusahaan tersebut dari waktu ke waktu. Individu ini mempunyai beberapa peran pemangku kepentingan perusahaan.

### 2.1.1.3. Teori Kepengurusan (*Stewardship Theory*)

Donaldson dan Davis (1991 : 51) menjelaskan mengenai definisi *stewardship theory* adalah sebagai berikut :

*“These theoretical considerations argue a view of managerial motivation alternative to agency theory and which may be termed stewardship theory. The executive manager, under this theory, far from being an opportunistic shirker, essentially wants to do a good job, to be a good steward of the corporate assets. Thus, stewardship theory holds that there is no inherent, general problem of executive motivation”.*

Teori kepengurusan didasarkan pada manajer yang memiliki perilaku dimana dia dapat dibentuk agar selalu dapat diajak bekerjasama dalam organisasi, memiliki perilaku kolektif atau berkelompok dengan utilitas tinggi daripada individunya dan selalu bersedia untuk melayani. Pada teori kepengurusan terdapat suatu pilihan antara perilaku *self serving* dan pro-organisasional, perilaku manajer tidak akan dipisahkan dari kepentingan organisasi adalah bahwa perilaku eksekutif disejajarkan dengan kepentingan prinsipal dimana para manajer berada. Manajer akan menggantikan atau mengalihkan *self serving* untuk berperilaku kooperatif. Sehingga meskipun kepentingan antara manajer dan prinsipal tidak sama, manajer tetap akan menjunjung tinggi nilai kebersamaan. Sebab manajer berpedoman bahwa terdapat utilitas yang lebih besar pada perilaku kooperatif, dan perilaku tersebut dianggap perilaku rasional yang dapat diterima.

Mengacu pada *stewardship theory*, perilaku manajer adalah kolektif, sebab manajer berpedoman dengan perilaku tersebut tujuan organisasi dapat dicapai. Misalnya peningkatan penjualan atau profitabilitas. Perilaku ini akan menguntungkan prinsipal termasuk *outside owner* (melalui efek positif yang ditimbulkan oleh laba dalam bentuk deviden dan *shareprices*), hal ini juga



memberikan manfaat pada status manajerial, sebab tujuan mereka ditindak lanjuti dengan baik oleh manajer. Para ahli *stewardship theory* mengasumsikan bahwa ada hubungan yang sangat kuat antara kesuksesan organisasi dengan kepuasan prinsipal. Manajer melindungi dan memaksimalkan pemegang saham melalui kinerja perusahaan, oleh karena itu fungsi utilitas manajer dimaksimalkan.

Manajer yang dengan sukses dapat meningkatkan kinerja perusahaan akan mampu memuaskan sebagian besar organisasi yang lain, sebab sebagian besar pemegang saham memiliki kepentingan yang telah dilayani dengan baik lewat peningkatan kemakmuran yang diraih organisasi. Oleh karena itu, manajer yang pro-organisasional termotivasi untuk memaksimalkan kinerja perusahaan, disamping dapat memberikan kepuasan kepada kepentingan pemegang saham.

Dalam perkembangan selanjutnya, *agency theory* mendapat respon lebih luas karena dipandang lebih mencerminkan kenyataan yang ada. Berbagai pemikiran mengenai *corporate governance* berkembang dengan bertumpu pada *agency theory* di mana pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku.

#### **2.1.1.4. Teori Organisasi (*Organizational Theory*)**

Organisasi berasal dari bahasa Yunani *organon*, yang berarti “alat” (*tool*). Kata ini masuk ke bahasa Latin menjadi *organizatio* dan kemudian ke bahasa Prancis (abad ke-14) menjadi *organisation*. Pengertian awalnya tidak merujuk pada benda atau proses, melainkan tubuh manusia atau makhluk biologis lainnya. Tidak sama dengan alat mekanis, *organon* terdiri dari bagian-bagian yang

tersusun dan terkoordinasi hingga mampu menjalankan fungsi tertentu secara dinamis.

Dunsire (1973 : 112) memberikan definisi mengenai organisasi sebagai berikut :

*“Organizations are grand strategies individuals create to achieve objectives that require the effort of many”*

Robbins (1990 : 4) mendefinisikan organisasi sebagai berikut :

*“An organization is a consciously coordinated social entity, with a relatively identifiable boundary, that functions on a relatively continuous basis to achieve a common goal or set of goals”.*

Mills dan Mills (2000 : 58) mendefinisikan organisasi sebagai berikut :

*“Specific collectivities of people whose activities are coordinated and controlled in and for the achievement of defined goals”.*

Dari definisi diatas dapat dikatakan bahwa organisasi adalah sistem peran, aliran aktivitas dan proses (pola hubungan kerja) dan melibatkan beberapa orang sebagai pelaksana tugas yang didisain untuk mencapai tujuan bersama.

Karakteristik utama dari organisasi dapat diringkas menjadi 3-P, yaitu : *purpose*, *people*, dan *plan*. Sesuatu tidak disebut organisasi bila tidak memiliki tujuan (*purpose*), anggota (*people*), dan rencana (*plan*). Dalam aspek “rencana” terkandung semua ciri lainnya seperti sistem, struktur, desain, strategi, dan proses yang seluruhnya dirancang untuk menggerakkan unsur manusia (*people*) dalam mencapai berbagai tujuan yang telah ditetapkan.

Agar suatu organisasi dapat bekerja dan mempertahankan keberadaannya, maka perlu ada struktur organisasi dan prosedur pelaksanaan pekerjaan. Tujuan organisasi menentukan struktur organisasi, yaitu menentukan seluruh tugas pekerjaan, hubungan antar tugas, batas wewenang, dan tanggung jawab untuk menjalankan masing-masing tugas yang dibebankan.

Menurut Robbins (1990 : 5), struktur organisasi dapat didefinisikan sebagai berikut :

*“How task are allocated, who reports to whom, and the formal coordinating mechanisms and interactions patterns that will be follow”.*

Struktur organisasi mengacu pada hubungan diantara elemen-elemen sosial yang meliputi orang, posisi, dan unit-unit organisasi dimana berada. Struktur organisasi menjelaskan pengaturan berbagai elemen organisasi agar berada pada tempat dan fungsinya masing-masing, sehingga efektif untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Berkaitan dengan struktur organisasi, besaran dari sebuah organisasi adalah faktor penting didalam mempengaruhi struktur. Organisasi besar telah terbukti mempunyai banyak kesamaan komponen struktural, demikian juga dengan organisasi kecil, yang paling penting adalah bukti menunjukkan bahwa beberapa hal dari komponen tersebut mengikuti sebuah pola tertentu pada saat organisasi berkembang dalam besarannya.

Besaran dari sebuah organisasi khususnya perusahaan mempunyai hubungan dengan penerapan *good corporate governance*. Jika perusahaan berbentuk perusahaan perseorangan atau persekutuan yang hanya dimiliki oleh satu orang saja dan bermodal kecil, maka perusahaan tersebut tidak wajib untuk

menerapkan *good corporate governance*. Tetapi jika sebuah perusahaan sudah berbentuk badan hukum yang disebut dengan perseroan terbatas, dan perusahaan ini telah menerbitkan saham untuk dijual kepemilikannya di pasar modal, maka perusahaan seperti ini akan memiliki lebih dari 1 orang kepemilikan dengan modal yang besar, maka dari itu perusahaan seperti ini wajib untuk menerapkan *good corporate governance*. Karena pada dasarnya *corporate governance* adalah suatu sistem yang membuat pemegang saham percaya bahwa mereka akan memperoleh keuntungan dari dana yang sudah mereka tanamkan.

### 2.1.2. *Good Corporate Governance*

Istilah *corporate governance* pertama kali diperkenalkan *Cadbury Committe* pada tahun 1992 dalam laporan yang dikenal *Cadbury Report*. Menurut *Cadbury Report* (1992 : 14) yang dimaksud dengan *corporate governance* adalah:

*“a set of rules that define the relationship between shareholders, managers, creditors, the government, employees and other internal and external stakeholders in respect to their rights and responsibilities, or the system by which companies are directed and controlled”.*

*Organization of Economic Cooperation and Development (OECD) (2004 :*

11) mendefinisikan *corporate governance* sebagai berikut:

*“Corporate governance involves a set of relationships between a company’s management, its board, its shareholders and other stakeholders. Corporate governance also provides the structure through which the objectives of the company are set, and the means of attaining those objectives and monitoring performance are determined.”.*

*Good corporate governance* sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*good corporate governance*) pada Badan Usaha Milik Negara, adalah :

“Prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha”.

Menurut *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG) (2000), yang dimaksud *good corporate governance* adalah :

“Struktur, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ perusahaan sebagai upaya untuk memberikan nilai tambah perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan berdasarkan norma, etika, budaya, dan aturan yang berlaku”.

Menurut Muh (2009) dalam Like (2012 : 2), *good corporate governance* diartikan sebagai :

“Seperangkat sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan. Hal ini disebabkan karena *good corporate governance* dapat mendorong terbentuknya pola kerja manajemen yang bersih, transparan, dan profesional”.

*Good corporate governance* pada dasarnya merupakan suatu sistem (input, proses, output) dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang kepentingan terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan diwan direksi demi tercapainya tujuan perusahaan. *Good corporate governance* dimasukkan untuk mengatur hubungan-hubungan ini dan mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan signifikan dalam strategi perusahaan dan untuk memastikan bahwa kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki segera (Zarkasyi, 2008 : 36).

*Good corporate governance* merupakan bentuk pengelolaan perusahaan yang baik, dimana didalamnya tercakup suatu bentuk perlindungan terhadap

kepentingan pemegang saham sebagai pemilik perusahaan dan kreditor sebagai penyandang dana eksternal. Sistem *corporate governance* yang baik akan memberikan perlindungan efektif kepada para pemegang saham dan kreditor untuk memperoleh kembali atas investasi dengan wajar, tepat dan seefisien mungkin, serta memastikan bahwa manajemen bertindak sebaik yang dapat dilakukannya untuk kepentingan perusahaan.

#### **2.1.2.1. Prinsip *Good Corporate Governance***

Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMN Prinsip GCG meliputi Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Kemandirian, Kewajaran. Hal tersebut harus dilakukan agar perusahaan dapat mencapai kinerja yang berkesinambungan dengan tetap memperhatikan pihak pemegang kepentingan.

##### **1. Transparansi**

Transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk

pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

## 2. Akuntabilitas

Akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

## 3. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban yaitu kesesuaian didalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

## 4. Kemandirian

Kemandirian, yaitu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan

harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

## 5. Kewajaran

Kewajaran, yaitu keadilan dan kesetaraan didalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

### 2.1.2.2. Manfaat *Good Corporate Governance*

*Corporate Governance* yang baik diakui dapat membantu mempertahankan perusahaan dari kondisi-kondisi yang tidak menguntungkan. Bagi perusahaan keuntungan yang dapat diperoleh dari penerapan GCG adalah :

1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi dan terciptanya budaya kerja yang sehat.
2. Meminimalkan kerugian akibat penyalahgunaan wewenang oleh Direksi (*agency cost*) dan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan.
3. Meningkatkan kepercayaan investor dan pada akhirnya meningkatkan pula nilai saham perusahaan.
4. Dengan adanya peningkatan kinerja perusahaan akan meningkatkan pula *shareholders's value* dan dividen. Khususnya bagi BUMN hal ini akan



membantu penerimaan APBN untuk anggaran pembangunan baik dari bagian keuntungan maupun pajak yang dibayarkan perusahaan.

5. Praktek *GCG* menempatkan karyawan sebagai salah satu *stakeholders* yang harus dikelola dengan baik. Pengelolaan yang baik akan meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja karyawan. Hal ini penting untuk meningkatkan produktivitas perusahaan.
6. Meningkatkan citra positif perusahaan sekaligus meminimalkan *cost* akibat tuntutan *stakeholders* kepada perusahaan.

### 2.1.3. Ukuran Perusahaan

Menurut Ferry dan Jones (1979) dalam Verawati dan Juniarti (2014 : 123) yang dimaksud ukuran perusahaan adalah:

“Ukuran perusahaan yang menggambarkan besar kecilnya perusahaan yang ditunjukkan dengan besar kecilnya aktiva, jumlah penjualan, rata-rata tingkat penjualan, dan rata-rata total aktiva”.

Ardi dan Lana (2007 : 54) memberikan penjelasan mengenai ukuran perusahaan sebagai berikut :

“Ukuran perusahaan merupakan nilai yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan yang diukur dengan menggunakan total penjualan, total aset, dan kapitalisasi pasar. Semakin besar total aktiva maka semakin banyak modal ditanam, semakin banyak penjualan maka semakin banyak perputaran uang dan semakin besar kapitalisasi pasar maka semakin besar pula perusahaan dikenal di masyarakat”.

Ukuran perusahaan merupakan gambaran besar kecilnya perusahaan yang ditentukan berdasarkan nominal. Ukuran perusahaan adalah rata-rata total penjualan bersih untuk tahun yang bersangkutan sampai beberapa tahun. Dalam

hal ini penjualan lebih besar daripada biaya variabel dan biaya tetap, maka akan diperoleh jumlah pendapatan sebelum pajak. Sebaliknya jika penjualan lebih kecil daripada biaya variabel dan biaya tetap maka perusahaan akan menderita kerugian (Susilowati, 2015 : 32).

Ukuran Perusahaan merupakan ukuran atas besarnya aset yang dimiliki perusahaan sehingga perusahaan besar umumnya mempunyai total aktiva yang besar pula. Perusahaan besar dapat lebih mudah untuk mengakses pasar modal dibandingkan dengan perusahaan yang kecil. Semakin besar ukuran perusahaan semakin mudah untuk mendapatkan modal eksternal dalam jumlah yang lebih besar, sehingga investor tertarik untuk menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut sehingga menaikkan nilai perusahaan. Dengan tersedianya dana tersebut maka memberi kemudahan perusahaan untuk melaksanakan investasi.

Menurut Badan Standarisasi Nasional dalam Puspita (2011 : 38), kategori ukuran perusahaan ada 3, yaitu:

#### 1. Perusahaan Kecil

Perusahaan dapat dikategorikan perusahaan kecil apabila memiliki kekayaan bersih lebih dari 50.000.000,- dengan paling banyak 500.000.000,- tidak termasuk bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 300.000.000,- sampai dengan paling banyak 2.500.000.000,-.

#### 2. Perusahaan Menengah

Perusahaan dapat dikategorikan perusahaan menengah apabila memiliki kekayaan bersih lebih dari 500.000.000,- sampai dengan paling banyak 10.000.000.000,- tidak termasuk bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil

penjualan tahunan lebih dari 2.500.000.000,- sampai dengan paling banyak 50.000.000.000,-.

### 3. Perusahaan Besar

Perusahaan dapat dikategorikan perusahaan besar apabila memiliki kekayaan bersih lebih dari 10.000.000.000,- tidak termasuk bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 50.000.000.000,-

#### **2.1.4. Kinerja Keuangan**

Kinerja pada dasarnya merupakan sesuatu yang dihasilkan atau hasil kerja yang dicapai dari suatu usaha. Kinerja merupakan sesuatu yang dihasilkan oleh suatu organisasi dalam periode tertentu dengan mangacu pada standar yang ditetapkan. Kinerja perusahaan hendaknya merupakan hasil yang dapat diukur dan menggambarkan kondisi empirik suatu perusahaan dari berbagai ukuran yang disepakati (Zarkasyi, 2008 : 48).

Kinerja keuangan merupakan suatu gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat-alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu. Penilaian kinerja keuangan merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pihak manajemen agar dapat memenuhi kewajibannya terhadap para penyandang dana dan juga untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

Kinerja keuangan dapat dinilai melalui informasi kinerja yang berasal dari laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan suatu informasi yang

menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, dan lebih jauh informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut (Fahmi, 2013 : 2).

Menurut Hery (2015 : 3) yang dimaksud dengan laporan keuangan adalah :

“Hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan”.

Dengan kata lain, laporan keuangan ini berfungsi sebagai alat informasi yang menghubungkan perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan, yang menunjukkan kondisi kesehatan keuangan perusahaan dan kinerja perusahaan.

Karena penilaian kinerja keuangan didasarkan pada laporan keuangan, maka untuk melakukan penilaian kinerja ini menggunakan rasio keuangan. Rasio keuangan merupakan suatu perhitungan rasio dengan menggunakan laporan keuangan yang berfungsi sebagai alat ukur dalam menilai kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. Menurut Hery (2015 : 161) rasio keuangan adalah:

“Angka yang diperoleh dari hasil perbandingan antara satu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan relevan dan signifikan”.

Analisis rasio merupakan bagian dari analisis keuangan. Analisis rasio adalah analisis yang digunakan dengan menghubungkan berbagai perkiraan yang ada pada laporan keuangan dalam bentuk rasio keuangan. Secara garis besar, saat ini dalam praktik setidaknya ada lima jenis rasio keuangan yang sering digunakan untuk menilai kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. Kelima jenis rasio

tersebut adalah Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas, Rasio Aktivitas, Rasio Profitabilitas, dan Rasio Pasar.

1. Rasio Likuiditas, merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang segera jatuh tempo. Rasio likuiditas diperlukan untuk kepentingan analisis kredit atau analisis risiko keuangan. Rasio Likuiditas terdiri atas :

- a. Rasio Lancar (*Current Ratio*), merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang segera jatuh tempo dengan menggunakan aset lancar yang tersedia.
- b. Rasio Sangat Lancar atau Rasio Cepat (*Quick Ratio* atau *Acid Test Ratio*), merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang segera jatuh tempo dengan menggunakan aset sangat lancar (kas+sekuritas jangka pendek), tanpa memperhitungkan persediaan barang dan aset lancar lainnya.
- c. Rasio Kas (*Cash Ratio*), merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar uang kas atau setara kas yang tersedia untuk membayar utang jangka pendek.

2. Rasio Solvabilitas atau Rasio Struktur Modal atau Rasio Leverage, merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya. Sama halnya dengan rasio likuiditas, rasio solvabilitas juga diperlukan untuk kepentingan analisis kredit atau analisis risiko keuangan. Rasio Solvabilitas terdiri atas :

- a. Rasio Utang (*Debt Ratio*), merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aset. Rasio ini juga sering dinamakan sebagai rasio utang terhadap aset (*Debt to Asset Ratio*).
  - b. Rasio Utang terhadap Ekuitas (*Debt to Equity Ratio*), merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan ekuitas.
  - c. Rasio Utang Jangka Panjang terhadap Ekuitas (*Long Term Debt to Equity Ratio*), merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara utang jangka panjang dengan total ekuitas.
  - d. Rasio Kelipatan Bunga yang Dihasilkan (*Times Interest Earned Ratio*), merupakan rasio yang menunjukkan (sejauh mana atau berapa kali) kemampuan perusahaan dalam membayar bunga. Kemampuan perusahaan disini diukur dari jumlah laba sebelum bunga dan pajak.
  - e. Rasio Laba Operasional terhadap Kewajiban (*Operating Income to Liabilities Ratio*), merupakan rasio yang menunjukkan (sejauh mana atau berapa kali) kemampuan perusahaan dalam melunasi seluruh kewajiban. Kewajiban perusahaan disini diukur dari jumlah laba operasional.
3. Rasio Aktivitas, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi atas pemanfaatan sumber daya yang dimiliki perusahaan, atau untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Rasio ini dikenal juga sebagai rasio pemanfaatan aset, yaitu rasio yang digunakan untuk menilai efektivitas dan intensitas aset perusahaan dalam menghasilkan penjualan. Rasio Aktivitas terdiri atas :

- a. Perputaran Piutang Usaha (*Accounts Receivable Turn Over*), merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa lama penagihan piutang usaha atau berapa kali dana yang tertanam dalam piutang usaha akan berputar dalam satu periode.
  - b. Perputaran Persediaan (*Inventory Turn Over*), merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang tertanam dalam persediaan akan berputar dalam satu periode.
  - c. Perputaran Modal Kerja (*Working Capital Turnover*), merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur keefektifan aset tetap yang dimiliki perusahaan dalam menghasilkan penjualan.
  - d. Perputaran Aset Tetap (*Fixed Assets Turnover*), merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur keefektifan aset tetap yang dimiliki perusahaan dalam menghasilkan penjualan.
  - e. Perputaran Total Aset (*Total Assets Turnover*), merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa jumlah penjualan yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset.
4. Rasio Profitabilitas, merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Rasio ini dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu Rasio Tingkat Pengembalian atas Investasi dan Rasio Kinerja Operasi.

Rasio Tingkat Pengembalian atas Investasi adalah rasio yang digunakan untuk menilai kompensasi finansial atas penggunaan aset atau ekuitas terhadap laba bersih (laba setelah bunga dan pajak), Rasio ini terdiri atas :

- a. Hasil Pengembalian atas Aset (*Return On Assets*), merupakan rasio yang menunjukkan hasil (*return*) atas penggunaan aset perusahaan dalam menciptakan laba bersih. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset.
- b. Hasil Pengembalian atas Ekuitas (*Return On Equity*), merupakan rasio yang menunjukkan hasil (*return*) atas penggunaan ekuitas perusahaan dalam menciptakan laba bersih. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total ekuitas.

Rasio Kinerja Operasi adalah rasio yang digunakan untuk mengevaluasi margin laba dari aktivitas operasi (penjualan). Rasio ini terdiri atas:

- a. Margin Laba Kotor (*Gross Profit Margin*), merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya persentase laba kotor atas penjualan bersih.
  - b. Margin Laba Operasional (*Operating Profit Margin*), merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya persentase laba operasional atas penjualan bersih.
  - c. Margin Laba Bersih (*Net Profit Margin*), merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya persentase laba bersih atas penjualan bersih.
5. Rasio Penilaian atau Rasio Ukuran Pasar, merupakan rasio yang digunakan untuk mengestimasi nilai intrinsik perusahaan (nilai saham). Rasio ini terdiri atas :



- a. Laba Per Lembar Saham Biasa (*Earnings Per Share*), merupakan rasio untuk mengukur keberhasilan manajemen perusahaan dalam memberikan keuntungan bagi pemegang saham biasa. Rasio ini menunjukkan keterkaitan antara jumlah laba bersih dengan bagian kepemilikan pemegang saham dalam perusahaan investee.
- b. Rasio Harga terhadap Laba (*Price Earnings Ratio*), merupakan rasio yang menunjukkan hasil perbandingan antara harga pasar per lembar saham dengan laba per lembar saham.
- c. Imbal Hasil Dividen (*Dividen Yield*), merupakan rasio yang menunjukkan hasil perbandingan antara dividen tunai per lembar saham dengan harga pasar per lembar saham. Rasio ini digunakan untuk mengukur *return* (imbal hasil) atas investasi saham.
- d. Rasio Pembayaran Dividen (*Dividend Payout Ratio*), merupakan rasio yang menunjukkan hasil perbandingan antara dividen tunai per lembar saham dengan laba per lembar saham. Rasio ini menggambarkan jumlah laba dari setiap lembar saham yang dialokasikan dalam bentuk dividen.
- e. Rasio Harga terhadap Nilai Buku (*Price to Book Value Ratio*), merupakan rasio yang menunjukkan hasil perbandingan antara harga pasar per lembar saham dengan nilai buku per lembar saham. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat harga saham apakah *overvalued* atau *undervalued*.

### 2.1.5. Penelitian Terdahulu

Yulianti (2009) meneliti tentang pengaruh penerapan *good corporate governance* terhadap kinerja perbankan. Analisis data dilakukan dengan metode analisis regresi berganda. Sampel yang digunakan didalam penelitian ini sebanyak 23 bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2006 dan 2007. Variabel independen didalam penelitian ini adalah penerapan *good corporate governance* berdasarkan PBI no.8/4/06, variabel dependen didalam penelitian ini adalah kinerja perbankan yang diukur dengan CAMEL (CAR, *Assets, Management, Earning, dan Liquidity*), dan variabel kontrol adalah ukuran bank yang diukur dengan logaritma natua total aset. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *good corporate governance* dan ukuran bank berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Secara parsial penerapan *good corporate governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja bank. Ukuran bank berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja bank.

Iqbal (2012) meneliti tentang pengaruh *good corporate governance* dan ukuran perusahaan terhadap kinerja perusahaan. Analisis Data dilakukan dengan metode analisis regresi berganda. Sampel ditentukan dengan metode *random sampling* yaitu 160 perusahaan yang terdaftar di BEI pada tahun 2010. Variabel independen didalam penelitian ini adalah *good corporate governance* yang di proksi dengan jumlah dewan direksi dan dewan komisaris, dan ukuran perusahaan yang diukur dengan logaritma natua total aset, variabel dependen didalam penelitian ini adalah kinerja keuangan perusahaan yang diukur dengan *Cash Flow Return On Assets (CFROA)*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran

dewan direksi, ukuran dewan komisaris, dan ukuran perusahaan tidak mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan.

Anton (2012) meneliti tentang analisis *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan perusahaan. Analisis data dilakukan dengan metode regresi. Sampel ditentukan dengan metode *purposive sampling* yaitu perusahaan yang memperoleh skor pemeringkatan IICG tahun 2004-2008. Variabel independen dalam penelitian ini adalah *good corporate governance* yang diukur berdasarkan skor pemeringkatan IICG, variabel dependen adalah kinerja keuangan yang diukur dengan EVA, dan variabel kontrol adalah kesempatan pertumbuhan dan ukuran perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa GCG tidak berpengaruh terhadap EVA, kesempatan pertumbuhan berpengaruh positif terhadap EVA, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap EVA.

Like (2012) meneliti tentang pengaruh praktek *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan perusahaan di bursa efek Indonesia. Analisis data dilakukan dengan metode regresi. Sampel ditentukan dengan metode *purposive sampling* yaitu perusahaan yang memperoleh skor pemeringkatan IICG tahun 2008-2010. Variabel independen dalam penelitian ini adalah GCG yang diukur berdasarkan skor pemeringkatan IICG, variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan yang diukur dengan ROE dan NPM. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa GCG berpengaruh positif terhadap ROE dan NPM.

Coskun dan Sayilir (2012) meneliti tentang pengaruh *corporate governance* terhadap kinerja keuangan perusahaan di Turki. Analisis data dilakukan dengan metode analisis regresi. Sampel pada penelitian ini adalah 31

perusahaan yang dipublikasikan oleh asosiasi *corporate governance* Turki tahun 2006-2010. Variabel independen dalam penelitian ini adalah GCG yang diukur dengan *corporate governance index*, variabel dependen dalam penelitian ini adalah nilai perusahaan yang diukur dengan *tobins-Q* dan kinerja keuangan perusahaan yang diukur dengan ROA dan ROE. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa GCG tidak berpengaruh terhadap *tobins-Q*, ROA, dan ROE.

Gabriela dan Fidelis (2013) meneliti tentang pengaruh penerapan *corporate governance* terhadap kinerja keuangan perusahaan hasil survey *The Indonesia Institute Perception Governance* (IICG). Analisis data dilakukan dengan metode analisis regresi berganda. Sampel ditentukan dengan metode *purposive sampling* yaitu 62 perusahaan yang ikut serta didalam *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) tahun 2008-2011. Variabel independen didalam penelitian ini adalah penerapan *good corporate governane* yang diukur menggunakan pemeringkatan yang dikembangkan oleh *The Indonesian Institute of Corporate Governance* (IICG) berupa *Corporate Governance Perception Index* (CGPI), variabel dependen didalam penelitian ini adalah kinerja keuangan perusahaan yang diukur dengan ROA, ROE, dan *Tobin's Q*, serta variabel kontrol berupa komposisi aset, kesempatan bertumbuh, dan ukuran perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *good corporate governance* tidak berpengaruh dengan kinerja keuangan perusahaan yang diukur dengan ROA dan *Tobin's Q*, namun memiliki pengaruh yang signifikan jika diukur dengan ROE. Komposisi aktiva dan kesempatan pertumbuhan tidak mempengaruhi kinerja keuangan,

sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan ROA.

Chen et al (2013) meneliti tentang *corporate governance* dan kinerja perusahaan. Analisis data dilakukan dengan metode analisis regresi berganda. Sampel pada penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di *Chinese Stock Exchange* pada tahun 2007-2011. Variabel independen pada penelitian ini adalah *corporate governance* yang diukur dengan *Corporate Governance Index* (CGI), variabel dependen dalam penelitian ini adalah *Firm Performance Index* (FPI), dan variabel control didalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan, *leverage*, dan jenis industri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *corporate governance* berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan, dan ukuran perusahaan, *leverage*, dan industri berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

Renny et al (2013) meneliti tentang penerapan *good corporate governance* dan pengaruhnya terhadap kinerja perusahaan yang dimediasi dengan ukuran perusahaan. Analisis data yang digunakan adalah metode analisis regresi linear. Sampel ditentukan dengan metode *purposive sampling* yaitu 34 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2006-2010. Variabel independen didalam penelitian ini adalah *good corporate governance* yang diukur dengan *Corporate Governance Perception Index* (CGPI), variabel dependen adalah kinerja perusahaan yang diukur dengan *Economic Value Added* (EVA), dan variabel moderating yaitu ukuran perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi *good corporate governance* berpengaruh secara langsung

terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan EVA, dan berpengaruh secara tidak langsung melalui ukuran perusahaan.

Komang dan I Gusti (2013) meneliti tentang pengaruh *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan lembaga perkreditan desa (LPD) di kecamatan Mengwi kabupaten Badung. Alat analisis yang digunakan didalam penelitian ini adalah analisis regresi linear. Sampel pada penelitian ini adalah 35 LPD. Variabel independen dalam penelitian ini adalah GCG yang diukur dengan menyebarkan kuesioner, variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan ROA. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan GCG berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan LPD di kecamatan Mengwi kabupaten Badung.

Dogan (2013) meneliti tentang pengaruh ukuran perusahaan terhadap kinerja perusahaan. Alat analisis yang digunakan didalam penelitian ini adalah regresi dan korelasi. Sampel pada penelitian ini adalah 200 perusahaan yang terdaftar di *Istanbul Stock Exchange* pada tahun 2008-2011. Variabel independen dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan yang diukur dengan total aset, total penjualan, dan jumlah karyawan. Variabel kontrol didalam penelitian ini adalah umur perusahaan, *leverage*, dan likuiditas. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja perusahaan yang diukur dengan ROA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan, *leverage* dan umur perusahaan berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan, likuiditas berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan.

Niresh dan Velnampy (2014) meneliti tentang pengaruh ukuran perusahaan terhadap profitabilitas perusahaan manufaktur yang terdaftar di *colombo stock exchange*. Alat analisis yang digunakan dengan menggunakan analisis regresi dan korelasi. Sampel pada penelitian ini adalah 15 perusahaan manufaktur yang terdaftar di *colombo stock exchange* tahun 2008-2012. Variabel independen dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan yang diukur dengan  $\ln$  total aset dan  $\ln$  total penjualan, variabel dependen dalam penelitian ini adalah profitabilitas yang diukur dengan NPM dan ROA. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap NPM dan ROA.

Kennedy et al (2015) meneliti tentang pengaruh *good corporate governance* dan struktur modal pada kinerja perusahaan. Analisis data yang digunakan adalah metode analisis regresi linear berganda. Sampel pada penelitian ini adalah 56 perusahaan yang terdaftar di *East African Security Exchange* tahun 2009-2013. Variabel independen dalam penelitian ini adalah *good corporate governance* yang diukur dengan *corporate governance index*, variabel intervening adalah struktur modal yang diukur dengan *leverage*, variabel dependen adalah kinerja perusahaan yang diukur dengan ROA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *good corporate governance* meningkatkan kinerja perusahaan, dan dimasukkannya variabel struktur modal sebagai variabel intervening telah mempengaruhi interaksi antara *good corporate governance* dan kinerja perusahaan secara positif dan signifikan.

Berikut adalah ringkasan penelitian terdahulu :

Tabel 2.1

## PENELITIAN TERDAHULU

No	Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Model Analisis	Hasil Penelitian
1	Yulianti (2009)	Pengaruh Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Kinerja Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2006-2007	Variabel Bebas: X1 : GCG (PBI 08/04/06) Variabel terikat : Y : CAMEL Variabel Kontrol : X2 : Ukuran Perusahaan	Regresi Berganda	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penerapan GCG dan ukuran bank berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.</li> <li>- GCG berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja bank.</li> <li>- Ukuran bank berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja bank.</li> </ul>
2	Iqbal (2012)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di BEI 2010)	Variabel bebas : X1 : Ukuran Dewan Komisaris X2 : Ukuran Dewan Direksi X3 : Ukuran Perusahaan Variabel terikat : Y1 : CFROA	Regresi Berganda	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris, dan ukuran perusahaan tidak mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan.</li> </ul>
3	Anton (2012)	Analisis <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan	Variabel bebas : X1 : GCG (Skor IICG) Variabel terikat : Y1 : EVA Variabel kontrol : X2 : Ukuran Perusahaan X3 : Kesempatan Pertumbuhan	Regresi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- GCG tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.</li> <li>- Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.</li> <li>- Kesempatan pertumbuhan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan</li> </ul>
4	Like (2012)	Pengaruh Praktek <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Kinerja	Variabel bebas : X1 : GCG (Skor IICG) Variabel terikat :	Regresi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- GCC berpengaruh positif terhadap ROE.</li> <li>- GCG berpengaruh positif terhadap NPM.</li> </ul>



		Keuangan Perusahaan Di BEI	Y1 : ROE Y2 : NPM		
5	Coskun dan Sayilir (2012)	<i>Relationship Between Corporate Governance and Financial Performance of Turkish Companies</i>	Variabel bebas : X1 : CG Index Variabel terikat : X1 : Tobins – Q X2 : ROE X3 : ROA	Regresi	<ul style="list-style-type: none"> <li>– <i>Corporate governance</i> tidak berpengaruh terhadap Tobins – Q.</li> <li>– <i>Corporate governance</i> tidak berpengaruh terhadap ROA.</li> <li>– <i>Corporate governance</i> tidak berpengaruh terhadap ROE.</li> </ul>
6	Gabriela dan Fidelis (2013)	Pengaruh Penerapan <i>Corporate Governance</i> Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Hasil Survey <i>The Indonesian Institute Perception Governance (IIGC)</i> Periode 2008-2011	Variabel bebas : X1 : CGPI (Skor IICG) Variabel terikat: Y1 : ROA Y2 : Tobin's Q Y3 : ROE Variabel Kontrol : X2 : Komposisi Aset X3 : Kesempatan Bertumbuh X4 : Ukuran Perusahaan	Regresi Berganda	<ul style="list-style-type: none"> <li>– GCG tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan ROA dan <i>Tobin's-Q</i>, sedangkan jika diukur dengan ROE memiliki pengaruh signifikan.</li> <li>– Komposisi aktiva dan kesempatan pertumbuhan tidak mempengaruhi kinerja keuangan, sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan ROA.</li> </ul>
7	Chen et al (2013)	<i>Corporate Governance and Firm Performance: Empirical evidence from China</i>	Variabel Bebas : X1: CGI ( <i>Corporate Governance Index</i> ) Variabel Terikat : Y1: FPI ( <i>Firm Performance Index</i> ) Variabel Kontrol : X2 : Ukuran Perusahaan X3: <i>Leverage</i> X4 : Jenis Industri	Regresi Berganda	<ul style="list-style-type: none"> <li>– <i>Corporate governance</i> berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan,</li> <li>– Ukuran perusahaan, <i>leverage</i>, dan industri berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.</li> </ul>
8	Renny et al (2013)	<i>Implementation of Good Corporate</i>	Variabel Bebas : X1: CGPI (Skor	Regresi Berganda	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Implementasi <i>good corporate governance</i></li> </ul>

		<i>Governance and It's Impact on Corporate Performance: The Mediation Role of Firm Size (Empirical Study from Indonesia)</i>	IICG) Variabel Terikat : Y1: EVA Variabel Moderator : Z1: Ukuran Perusahaan		berpengaruh secara langsung terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan EVA, dan berpengaruh secara tidak langsung melalui ukuran perusahaan.
9	Komang dan I Gusti (2013)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Kinerja Keuangan Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung	Variabel bebas : X1 : Penerapan Prinsip TARIF GCG Variabel terikat: Y1 : ROA	Regresi	GCG berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan LPD.
10	Dogan (2013)	<i>Does Firm Size Affect The Firm Performance? Evidence From Turkey</i>	Variabel bebas : X1 : Total Aset X2 : Total Penjualan X3 : Jumlah Karyawan Variabel terikat : Y1 : ROA Variabel Kontrol : X4 : Umur Perusahaan X5 : <i>Leverage</i> X6 : Likuiditas	Regresi Korelasi	Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan Leverage dan umur perusahaan berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan Likuiditas berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan.
11	Niresh dan Velnampy (2014)	<i>Firm Size and Profitability : A Study of Listed Manufacturing Firm</i>	Variabel bebas : X1 : Ukuran Perusahaan Variabel terikat : Y1 : ROA Y2 : NPM	Regresi Korelasi	Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan.
12	Kennedy et al (2015)	<i>The Effect of Corporate Governance and Capital Structure on Performance of Firms Listed at The East African Community</i>	Variabel bebas : X1 : CGI Variabel terikat : Y1 : ROA Variabel Intervening : X2 : <i>Leverage</i>	Regresi Berganda	<i>Good corporate governance</i> meningkatkan kinerja perusahaan Variabel struktur modal sebagai variabel intervening telah mempengaruhi

		<i>Security Exchange</i>			interaksi antara <i>good corporate governance</i> dan kinerja perusahaan secara positif dan signifikan.
--	--	--------------------------	--	--	---

Didalam penelitian ini terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian sebelumnya, yaitu :

1. Pengukuran variabel *good corporate governance* pada penelitian ini diukur dengan mengikuti Keputusan Menteri BUMN Nomor : SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMN.
2. Pengukuran variabel ukuran perusahaan pada penelitian ini diukur dengan menggunakan Ln Total Aset dan Ln Total Sales.
3. Pengukuran variabel kinerja keuangan perusahaan diukur dengan mengikuti Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor : KEP-100/MBU/2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN.

## 2.2. Kerangka Pemikiran

Perspektif hubungan keagenan merupakan dasar yang digunakan untuk memahami *corporate governance*. Hubungan keagenan adalah sebuah kontrak antara prinsipal dan agen. Inti dari hubungan keagenan adalah adanya pemisahan antara kepemilikan (di pihak prinsipal/investor) dan pengendalian (di pihak agen/manajer). Prinsipal memiliki harapan bahwa manajer akan menghasilkan keuntungan dari uang yang mereka investasikan. Oleh karena itu, kontrak yang baik antara investor dan manajer adalah kontrak yang mampu menjelaskan

spesifikasi-spesifikasi apa sajakah yang harus dilakukan manajer dalam mengelola dana para investor, dan spesifikasi tentang pembagian keuntungan antara manajer dengan investor.

Dengan pemisahan kepemilikan tersebut, maka akan menimbulkan masalah keagenan. Masalah keagenan timbul dengan munculnya konflik kepentingan antara harapan investor dan harapan para manajer. Manajer yang seharusnya mengelola organisasi bisnis dengan baik agar kepentingan prinsipal menjadi optimal, ternyata dalam faktanya sering kali lebih mengedepankan kepentingan dia sendiri yang sering disebut dengan tindakan *moral hazard*. Tindakan *moral hazard* sangat mungkin terjadi karena adanya asimetri informasi. Kondisi ini memberikan kesempatan kepada manajer untuk memberikan informasi yang diketahuinya untuk memanipulasi pelaporan keuangan atau tahunannya sebagai usaha untuk memaksimalkan kemakmurannya.

Konflik kepentingan yang dikarenakan oleh kemungkinan bahwa agen tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal memicu terjadinya biaya keagenan. Jensen dan Meckling (1976 : 6) menyebutkan bahwa *agency cost* itu meliputi tiga hal yaitu *monitoring cost*, *bonding cost*, dan *residual cost*. Berkaitan dengan masalah keagenan, *corporate governance* yang merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan, diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada para investor bahwa mereka akan menerima *return* atas dana yang telah mereka investasikan. *Corporate governance* berkaitan dengan bagaimana para investor yakin bahwa manajer akan memberikan keuntungan bagi mereka, yakin bahwa manajer tidak akan menggelapkan atau

menginvestasikan ke dalam proyek-proyek yang tidak menguntungkan berkaitan dengan dana yang telah ditanamkan oleh investor, dan berkaitan dengan bagaimana para investor mengontrol para manajer (Darmawati dan Khomsiyah, 2003 : 11).

Menurut Wallace dan Zinkin (2005) dalam Yulianti (2009) satu-satunya cara untuk mengatasi masalah keagenan adalah dengan menerapkan *good corporate governance*. Tata kelola adalah suatu set pernyataan yang mampu membuat pemegang saham menggunakan votingnya untuk mendorong manajemen menghormati kepentingan mereka. Tata kelola perusahaan utamanya adalah isu untuk pemegang saham minoritas, dalam perusahaan yang dikontrol oleh manajer dimana tidak ada pemegang saham signifikan yang dapat bekerja sama dengan mudah.

Menurut Chariri (2014 : 2) *good corporate governance* diyakini dapat meminimalisir terjadinya masalah keagenan. Untuk memunculkan keselarasan antar pemilik perusahaan dan manajemen, diperlukan transparansi dari pihak manajemen kepada pemilik perusahaan, serta keadilan kepada pemangku kepentingan lain. Dalam pedoman umum *good corporate governance* Indonesia disebutkan ada lima prinsip *good corporate governance* yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran dan kesetaraan. Kelima prinsip ini membantu perusahaan untuk meminimalisir masalah keagenan, sehingga kinerja perusahaan menjadi lebih baik.

*Corporate governance* merupakan suatu elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi ekonomis, yang meliputi serangkaian hubungan antara

menejemen perusahaan, dewan direksinya (dewan direksi dan komisaris, untuk negara-negara yang menganut sistem hukum *two-tier*, termasuk Indonesia), para pemegang sahamnya dan *stakeholders* lainnya. *Corporate governance* juga memberikan suatu struktur yang memfasilitasi penentuan sasaran-sasaran (*objectives*) dari suatu perusahaan, dan sebagai sarana untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut dan sarana untuk menentukan teknik monitoring kinerja. *Good corporate governance* harus memberikan insentif yang tepat untuk dewan direksi dan menejemen dalam rangka mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan dari sisi kepentingan perusahaan dan para pemegang saham dan juga harus dapat memfasilitasi monitoring yang efektif, sehingga mendorong perusahaan untuk menggunakan sumberdaya secara efisien.

Menurut Yusoff dan Alhaji (2012 : 55) *stakeholder theory* berpusat pada isu-isu tentang pemangku kepentingan dalam sebuah institusi. Teori ini menyebutkan bahwa entitas perusahaan selalu berusaha untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan *stakeholder* yang beragam dalam rangka untuk memastikan bahwa masing-masing elemen menerima tingkat kepuasannya.

Pandangan dari *stakeholder theory* adalah bahwa semua pemangku kepentingan memiliki hak untuk diberikan informasi tentang bagaimana organisasi yang berada mempengaruhi mereka, walaupun mereka memilih untuk tidak menggunakan informasi itu dan bahkan jika mereka tidak dapat secara langsung mempengaruhi kelangsungan hidup organisasi (Al-Mamun et al, 2013 : 41). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa *stakeholder theory* dapat membantu perusahaan untuk mencapai salah satu mekanisme *corporate governance*, yaitu

transparansi, mengingat bahwa *good corporate governance* adalah seperangkat sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan, maka keberadaan konsep *good corporate governance* didukung oleh *stakeholder theory*.

Penerapan GCG dipercaya dapat meningkatkan kinerja atau nilai perusahaan. Pernyataan ini dapat ditemukan dalam berbagai *codes of corporate governance* hampir di semua negara. Menurut Dwi dan Bambang (2005 :249) *corporate governance* yang efektif dalam jangka panjang dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan menguntungkan pemegang saham. Peningkatan kinerja perusahaan tersebut tidak hanya untuk kepentingan pemegang saham namun juga untuk kepentingan publik secara umum.

Menurut Gabriela dan Fidelis (2013 : 3) perusahaan yang menerapkan praktek *good corporate governance* telah berupaya untuk meminimalkan risiko keputusan yang akan menguntungkan diri sendiri, sehingga akan meningkatkan kinerja perusahaan yang pada akhirnya dapat memaksimalkan nilai perusahaan. Oleh sebab itu, tujuan *corporate governance* bukan hanya diterapkannya praktek-praktek GCG tetapi juga meningkatkan nilai perusahaan.

Teori yang mendukung hubungan antara *good corporate governance* dengan kinerja perusahaan adalah *stewardship theory*. *Stewardship theory* melihat hubungan yang kuat antara manajer dan keberhasilan perusahaan, dan oleh karena itu manajer akan melindungi dan memaksimalkan kekayaan para pemegang saham melalui kinerja perusahaan. Seorang manajer yang berhasil meningkatkan kinerja perusahaan, akan memuaskan sebagian kelompok pemangku kepentingan

didalam sebuah organisasi ketika kelompok ini memiliki kepentingan yang terlayani dengan baik oleh meningkatnya nilai perusahaan (Yusoff dan Alhaji, 2012 : 57).

Menurut Al-Mamun et al (2013 : 42) pandangan dari *stewardship theory* adalah manajer akan membuat keputusan dan bertindak dalam kepentingan terbaik untuk perusahaan, memilih berperilaku kolektif dari pada mementingkan diri sendiri. Dengan memaksimalkan kekayaan para pemegang saham melalui kinerja perusahaan, manajer merasa bahwa fungsi utilitasnya dapat dimaksimalkan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Renny et al (2013) *good corporate governance* berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Perusahaan yang menerapkan prinsip GCG akan meningkatkan modal dengan mudah, mengurangi biaya modal, meningkatkan kinerja perusahaan, dan meningkatkan kinerja ekonomi. Penerapan prinsip-prinsip TARIF GCG juga mempengaruhi kinerja perusahaan melalui ukuran perusahaan. Ini berarti bahwa dalam penerapan GCG secara konsisten akan secara langsung meningkatkan ukuran perusahaan dan akan berdampak pada peningkatan kinerja perusahaan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Chen et al (2013) *corporate governance* berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. *Corporate governance* merupakan faktor penting didalam menjelaskan kinerja, dimana perusahaan-perusahaan yang memiliki ukuran perusahaan yang besar, pada umumnya akan memiliki kinerja yang baik. Hasil tersebut konsisten dengan hasil model yang mengasumsikan bahwa ketika perusahaan memiliki aset lebih, mereka cenderung menggunakannya untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah.



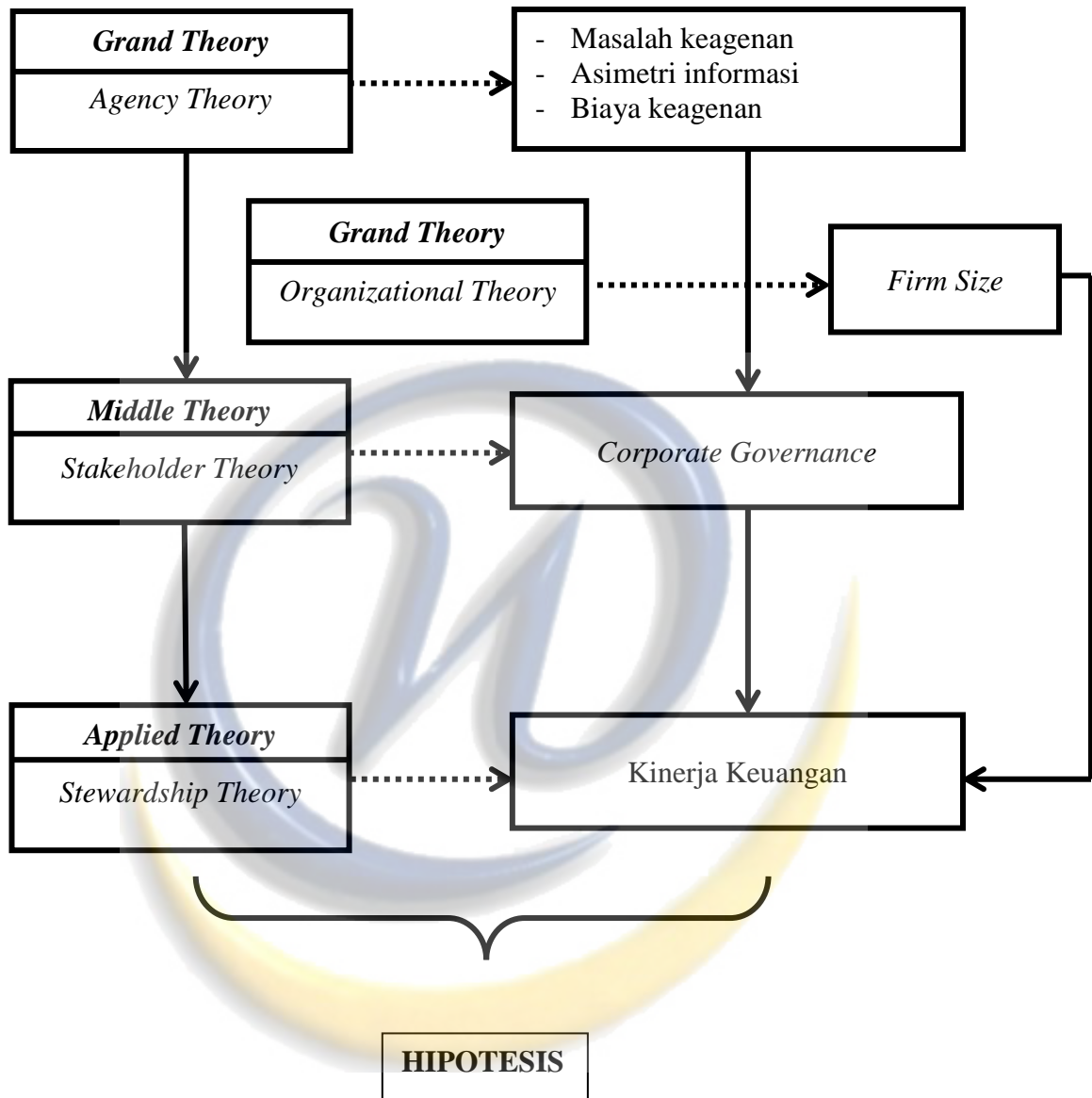
Penelitian ini juga menunjukkan bahwa perusahaan dengan ukuran yang lebih besar, maka dampak *corporate governance* juga akan besar, jadi untuk perusahaan yang besar perlu untuk meningkatkan tingkat *corporate governance*.

Menurut penelitian yang dilakukan Kennedy et al (2015) *corporate governance* berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* merupakan langkah besar untuk menciptakan perlindungan terhadap korupsi dan salah kelola manajemen, mempromosikan transparansi dalam kehidupan ekonomi dan menarik lebih banyak investasi baik didalam maupun diluar negeri. Selain itu, *corporate governance* adalah program yang efektif untuk memberantas korupsi dan juga mampu melindungi nilai pemegang saham.

Didalam penelitian ini, selain *good corporate governance*, ukuran perusahaan juga dijadikan variabel yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Ukuran perusahaan mempengaruhi kinerja perusahaan, karena semakin besar perusahaan, dapat dipastikan semakin besar juga dana yang dikelola dan semakin kompleks pula pengelolaannya. Perusahaan yang memiliki nilai aset besar lebih mendapat perhatian dari para investor untuk menanamkan modalnya ke perusahaan tersebut. Perusahaan besar cenderung mendapat perhatian lebih dari masyarakat luas. Dengan demikian, biasanya perusahaan besar memiliki kecenderungan untuk menjaga stabilitas dan kondisi perusahaan. Untuk menjaga stabilitas dan kondisi ini, perusahaan tentu akan berusaha mempertahankan dan terus meningkatkan kinerjanya (Iqbal, 2012 : 4).

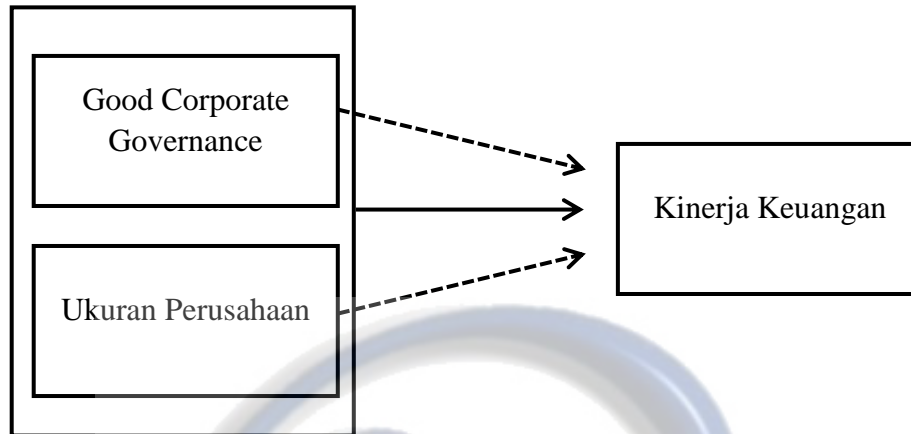
Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dogan (2013) ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Perusahaan akan memiliki profitabilitas yang tinggi sebagaimana ukuran perusahaan mereka berkembang. Perusahaan besar lebih efektif daripada perusahaan kecil karena mereka memanfaatkan skala ekonomi. Perusahaan besar memiliki kekuatan kompetitif lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan kecil. Sejak mereka memiliki pangsa pasar yang lebih besar, perusahaan besar memiliki kesempatan untuk mendapatkan keuntungan lebih. Selain itu, perusahaan besar mampu merebut kesempatan untuk bekerja dikondisi yang membutuhkan tingkat modal yang tinggi karena mereka memiliki sumber daya yang besar, dan situasi ini memberikan mereka kesempatan untuk bekerja di kondisi yang menguntungkan dengan sedikit kompetisi.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka paradigma penelitian ini adalah :



**Gambar 2.2**  
**Paradigma Penelitian**

### 2.3. Hipotesis

Hipotesis adalah pernyataan tentang sesuatu yang untuk sementara waktu dianggap benar, bisa juga diartikan sebagai pernyataan yang akan diteliti sebagai jawaban sementara dari suatu masalah. Berdasarkan rumusan masalah, tujuan, teori, penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran, maka hipotesis atau jawaban sementara dari permasalahan dalam penelitian ini adalah :

H1 = Ho : *Good Corporate Governance* tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan.

Ha : *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan.

H2 = Ho : Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan.

Ha : Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan.

H3 = Ho : *Good Corporate Governance* dan Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan.

Ha : *Good Corporate Governance* dan Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan.

